

# Model Desa Berbasis Riset di Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Miniatur Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia

**Author:**

Joko Mulyono<sup>1</sup>  
Lazib Ajibta  
Kurniawan<sup>2</sup>

**Affiliation:**

Badan Riset dan  
Inovasi Daerah  
Provinsi Jawa Tengah<sup>1,2</sup>

**Corresponding email**

[jonajateng@gmail.com](mailto:jonajateng@gmail.com)

**Histori Naskah:**

Submit: 2025-10-19  
Accepted: 2025-10-24  
Published: 2025-10-26



This is an Creative Commons  
License This work is licensed  
under a Creative Commons  
Attribution-NonCommercial 4.0  
International License

**Abstrak:**

Desa secara faktual dalam kehidupan masyarakat sehari-hari merupakan miniatur penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan pembangunan daerah muaranya ada pada pemerintahan di tingkat desa, diantaranya; permasalahan pendidikan keterampilan warga, layanan publik, kreativitas dan inovasi masyarakat. Artikel ditulis dengan tujuan untuk memberikan konsep model desa berbasis riset sebagai rekomendasi miniatur penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan metodologi diskriptif kualitatif, yaitu untuk mendeskripsikan secara komprehensif fenomena sehari-hari, dengan cara memberikan ringkasan yang akurat tentang objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, *focus group discussion* (FGD), observasi dan studi dokumentasi. Lokasi Penelitian ini di Desa sekitar Rawa Pening di Kabupaten Semarang. Teknik analisis penelitian berfokus pada menganalisis, menggambarkan, dan meringkas data kualitatif untuk memahami suatu fenomena atau keadaan sosial secara mendalam. Model penyelenggaraan pemerintahan desa dan masyarakat diharapkan mampu membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, potensi dan keterampilan dalam menentukan masa depan pembangunan di desanya. Pemberdayaan masyarakat terus berkembang dengan baik dengan adanya sinergi dan kolaborasi berbagai stakeholder. Pemberdayaan desa diimplementasikan dalam inovasi konsep Desa Berbasis Riset; 1) penyusunan kesejarahan dan potensi kearifan lokal desa, 2) mendorong pemerintahan desa clean government dan good governance, 3) mendorong pelaksanaan Sistem Pertanian Terpadu, 4) memberikan dukungan pengembangan UMKM, dan 5) memberikan dukungan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Sirkular. Model desa berbasis riset tersebut direkomendasikan dapat diimplementasikan di Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia sesuai dengan potensi dan kearifan lokal masing-masing desa dengan dukungan Pemerintah Daerah setempat.

**Kata kunci:** Desa Berbasis Riset; Desa Kesongo, Penyelenggaraan Pemerintahan;

## Pendahuluan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan pengentasan kemiskinan dalam pembangunan di desa masih banyak dihadapi oleh Pemerintah Desa. Anggaran Dana Desa sejak lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa belum berdampak signifikan merubah peta prosentase tingkat kemiskinan antara pedesaan dan perkotaan. Hal tersebut terbukti masih tingginya angka kemiskinan yang ada di Perdesaan dibanding Perkotaan.

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan merupakan salah satu misi Asta Cita dalam visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20242029 "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" (RPJMN 20242029). Di Indonesia tercatat 84.276 wilayah administrasi pemerintah setingkat desa (75.753 desa, 8.486 kelurahan), 37 UPT/SPT, 7.281 Kecamatan, 514 Kabupaten/Kota dan 38 Provinsi di Indonesia (Hardianto, 2022).

Tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Desa mengandung semangat ketahanan, kemandirian, kerakyatan, kemajuan dan kemakmuran dengan anggaran Dana Desa oleh Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan desa yang kuat, mandiri, maju, demokratis dan sejahtera tanpa kehilangan jati diri. Undang-Undang Desa tersebut mengamanatkan 2 (dua) azas pembangunan desa yang tidak dimiliki dalam regulasi Desa sebelumnya yaitu azas rekognisi yang merupakan hak asal-usul desa dan azas subsidiaritas yang merupakan kewenangan lokal berskala desa yang menjadikan Desa berbeda dengan organisasi kelembagaan dalam Sistem Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suharto, 2021).

Beberapa permasalahan yang sering muncul di desa, antara lain; terbatasnya sumberdaya manusia dalam pelaksanaan pemerintahan, pelaku-pelaku pembangunan belum paham akan tugas dan fungsi, pelayanan masyarakat masih belum optimal, regulasi Desa belum dibuat dan terdokumentasi, dan administrasi desa yang belum dimanfaatkan secara optimal. Terkait pelaksanaan dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta pemerataan hasil-hasil pembangunan, langsung pada tingkat desa. Desa diharapkan menjadi maju, kuat, mandiri dan berdaya. Desa dapat mengalami peningkatan kemampuan secara administrasi, kapasitas dalam melaksanakan pelayanan publik dan optimalisasi potensi desa, dengan melibatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya keterbukaan pemerintah desa, kurangnya anggaran dana desa dan jaranganya penyelenggaraan pelatihan terkait pemberdayaan, faktor pendukung yaitu adanya program kelompok tani dan adanya pemberian suplai bahan mentah untuk meningkatkan usaha masyarakat. Padahal desa melalui Kepala Desa dan Masyarakat Desa yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Musyawarah Desa (Musdes) sebagai Forum Tertinggi Pemerintahan Desa dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah desanya. Relevansi Desa sebagai miniatur penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia menjadi semakin nyata dan mudah dipahami dalam pelaksanaannya karena hampir semua aktivitas Pemerintahan di Indonesia semuanya ada Desa dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa bersama komunitas dan masyarakat Desa.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan merumuskan konsep model desa berbasis riset sebagai miniatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Harapan hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi sebagai laboratorium penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kemampuan inovasi dan kewirausahaan masyarakat di desa, mengembangkan produk dan jasa berbasis teknologi di desa, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa, dan membangun akses jejaring kolaborasi ekosistem riset dan inovasi di desa.

## **Studi Literatur**

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah indikator yang perlu di pupuk keberadaanya dalam upaya meningkatkan dan mendukung program percepatan pembangunan kemandirian desa, dalam acuan kerangka pembangunan secara nasional masyarakat desa menjadi *leading sector* perkembangan desa disuatu daerah (Setyariningsih & Utami, 2022). Agar desa dapat dapat maju, maka diperlukan

pemberdayaan desa secara ekosistem dan berkelanjutan. Bentuk pemberdayaan desa salah satunya adalah dengan mengembangkan desa wisata. Sejalan dengan gagasan Cecilia Fahima Faradiba et al (2023) bahwa keberhasilan pariwisata dengan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan akan berdampak positif untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Disisi lain, konsep pengembangan desa wisata berbasis masyarakat menjadi penting dalam bagian strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan. Untuk itu, pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan guna meningkatkan dan memperbaiki kondisi sebuah masyarakat khususnya bagi masyarakat (Syarifudin & Ma'ruf, 2022).

Budhi Pamungkas Gautama et al (2020) menjelaskan bahwa desa wisata merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat untuk memaksimalkan potensi- potensi yang dimiliki oleh suatu desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengoptimalkan program desa wisata untuk dijadikan komoditi pariwisata berbasis potensi lokal masyarakat. Hal ini terjadi di beberapa desa di Indonesia yang telah memberikan perubahan bagi masyarakat terlebih pada peningkatan pengetahuan dan perekonomian masyarakat. Namun demikian, desa wisata tanpa didukung dengan peran serta masyarakat dan perangkat desa maka akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat di desa wisata dapat dijadikan sebagai rujukan dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya. Pengembangan wisata berbasis masyarakat merupakan upaya strategis untuk memberdayakan masyarakat (Saepudin, 2022; Kirana & Artisa, 2020).

Pemberdayaan masyarakat merupakan sektor penting dalam pengembangan desa wisata (Sunarti et al., 2022). Untuk mengembangkan pariwisata, perlu memanfaatkan sumber daya masyarakat, sebagai salah satu pemangku kepentingan pariwisata, masyarakat berperan penting dalam mendukung pencapaian pemberdayaan untuk menjadikan mereka mandiri. Bentuk partisipasi aktif masyarakat menjadi modal dasar dalam mewujudkan desa wisata berkelanjutan dan berdaya saing. Hal ini sebagaimana dijelaskan Mohamad Nur Singgih (2021) bahwa, pengembangan desa wisata menjadi pilihan bagi BUMDes bagi desa-desa untuk tujuan mensejahterakan masyarakat sekitar. Masyarakat desa berdaya akan bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapat dan kesejahteraan.

## **Metode Penelitian**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu untuk memahami fenomena secara mendalam dalam mendapatkan gambaran yang utuh dan mendetail tentang suatu kondisi desa di Kesongo Kabupaten Semarang. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran karakteristik kewirausahaan sosial pada desa wisata. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, focus group discussion (FGD), observasi dan studi dokumentasi.

Menurut Creswell (2015) bahwa, pendekatan kualitatif dipilih dengan tujuan untuk membangun pemahaman tentang fenomena kewirausahaan sosial di pedesaan untuk mengembangkan teori baru. Peneliti melakukan pengamatan dan berinteraksi dengan subyek penelitian untuk berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka atas dunianya secara alamiah. Peneliti merupakan instrument dalam pengumpulan data.

Lokasi Penelitian ini di Desa sekitar Rawa Pening, yang merupakan danau terbesar yang ada di Kabupaten Semarang dengan luas mencapai 2.670 hektar. Pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh penghayatan, pengalaman, persepsi pemahaman dan pemberian arti kehidupan. Pendekatan kualitatif membantu peneliti dalam menggambarkan karakteristik kewirausahaan sosial di pedesaan, karena menekankan pada pendalaman pengalaman manusia dan untuk pengamatan secara teoritis (Komariah et al., 2018).

Berdasarkan pengambilan data dengan pendekatan kualitatif, peneliti melakukan tahapan analisis yaitu: 1. Pengumpulan data melalui wawancara atau observasi; 2. Reduksi data dengan memilih dan

menyederhanakan data mentah; 3. Kode dan kategorisasi data dengan mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema yang relevan; dan 4. Penyajian data dalam bentuk narasi atau matriks untuk mempermudah pemahaman, sebelum 5. Penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menginterpretasikan makna dari data yang telah diolah.

## Hasil

Desa Kesongo Kabupaten Semarang memiliki berbagai kegiatan budaya dan potensi desa berdaya, diantaranya; mengangkat kearifan lokal (*local wisdom*), penetapan sejarah hari jadi dan kesejarahan Desa Kesongo, museum mini kesejarahan desa yang interaktif dan edukatif baik virtual maupun skala kecil. Beberapa kondisi faktual di Desa Kesongo, diharapkan akan dapat melahirkan pertunjukan dalam pertemuan masyarakat dan pemangku kepentingan skala Desa Kesongo yang dapat membuat kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan dalam masyarakat. Potensi Desa Kesongo diharapkan akan dikenal oleh warga masyarakatnya sendiri dan masyarakat skala global dan berputarnya aktivitas ekonomi ikutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat desa di Kesongo yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi lokal. Data terbaru per Maret 2025 menunjukkan angka kemiskinan di Jawa Tengah adalah 9,48% atau sekitar 3,37 juta jiwa. Angka ini menurun dari 9,58% (3,40 juta jiwa) pada September 2024. Penurunan ini menunjukkan tren positif dengan berkurangnya sekitar 29 ribu orang miskin dalam periode tersebut, dan angka ini merupakan yang terendah dalam beberapa tahun terakhir (BPS, 2025). Data kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi capaian data kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Jumlah dan persentase penduduk miskin Jawa Tengah dapat dilihat secara jelas menurut BPS (2025) pada gambar 1 berikut,



Gambar 1. Jumlah dan persentase penduduk miskin Jawa Tengah 2021-2025

Data kemiskinan di Jawa Tengah berangsur membaik dari tahun ke tahun. Hal ini kehadiran pemerintah serius dalam penanganan angka kemiskinan. Strategi dalam penanganan kemiskinan adalah dengan program kegiatan pemberdayaan desa. Program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk memberikan pelatihan, pendampingan, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran, baik secara konvensional maupun digital, untuk mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. Salah satu upaya dalam rangka pemberdayaan UMKM adalah melalui Promosi dan Pemasaran. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk pameran, bazaar, pasar mini serta promosi online dalam membantu UMKM meningkatkan visibilitas dan jangkauan pasar. UMKM meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pemberdayaan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM berperan sebagai penggerak ekonomi utama yang memberikan peluang kerja dan pendapatan, membantu mengurangi

kemiskinan, serta mendorong pemerataan ekonomi. Selain itu, UMKM juga berkontribusi dalam pelestarian budaya dan menciptakan stabilitas ekonomi.

Selain itu, perlu adanya tata kelola pemerintahan Desa Kesongo memiliki prinsip penyelenggaraan pemerintahan *Clean Government & Good Governance*, meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, eektivitas dan efisiensi, penegak hukum, serta keadilan dan kesetaraan. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan *clean government & Good Governance* di Desa Kesongo dimaksud adalah konsep pemerintahan yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam pengelolaan negara. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Hal ini, dapat dilihat banyaknya kunjungan para wisatawan domestik yang berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat setempat dan tumbuh kembang UMKM dengan produk lokalnya.

Perangkat desa bersama masyarakat mengajak pemerintah termasuk Badan Riset dan Inovasi (Brida) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui penelitian. Bentuk kerjasama melibatkan studi tentang cara meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, dengan mengidentifikasi potensi lokal, mengukur keberhasilan program, dan menganalisis faktor pendukung atau penghambat. Hasil penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa seperti; pengembangan UMKM, desa wisata, pelatihan keterampilan, dan program ketahanan pangan. Pemberdayaan masyarakat desa di Desa Kesongo Kabupaten Semarang dilakukan dengan menggandeng beberapa unsur stakeholder seperti; Brin, perguruan tinggi, dan swasta.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kesongo Kabupaten Semarang mencakup; pengembangan ekonomi (seperti pelatihan UMKM dan agrowisata), peningkatan kapasitas (pelatihan keterampilan, literasi keuangan, dan digitalisasi desa), serta peningkatan akses layanan (seperti penyuluhan kesehatan dan pembangunan infrastruktur dasar seperti sekolah dan fasilitas sanitasi). Kegiatan ini juga bisa meliputi penguatan kelembagaan desa melalui pembentukan BUMDes. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat lebih dari sekadar keterlibatan, partisipasi, atau keterlibatan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menyiratkan kepemilikan dan tindakan komunitas yang secara eksplisit bertujuan untuk perubahan sosial dan politik. Pemberdayaan masyarakat adalah proses negosiasi ulang kekuasaan untuk mendapatkan lebih banyak kendali. Pemberdayaan melindungi kepercayaan diri, kesejahteraan, dan harga diri pengguna layanan. Pemberdayaan dapat membantu mereka mencapai hasil yang diinginkan, dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesehatan yang lebih berkelanjutan. Berikut gambar 1 adalah pelaksanaan dan komitmen pembentukan desa riset di Kesongo,



Pemberdayaan masyarakat desa di Kesongo Kabupaten Semarang melalui pariwisata dapat dilakukan, antara lain; mengembangkan desa wisata yang berbasis masyarakat untuk meningkatkan pendapatan,

menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong pelestarian budaya dan lingkungan lokal. Peran serta dan keterlibatan penuh masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi kunci sukses pariwisata Desa Kesongo. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan hingga pengelolaan, dengan memanfaatkan potensi lokal untuk menciptakan peluang ekonomi seperti usaha kuliner, kerajinan, pemandu wisata, dan penginapan. Wujud partisipasi masyarakat terkait yaitu mengawasi dan mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi dan tujuan pengembangan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber daya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Kesongo sejalan dengan konsep Margayaningsih (2018) seperti; pertemuan, pendampingan, bantuan dana, pembangunan infrastruktur, pembentukan organisasi desa wisata, dan gotong royong yang dilakukan oleh pengelola sungguh-sungguh menjadikan masyarakat mandiri dalam mengembangkan desa wisata. Selain itu menurut Nurul Ichsan & Setiadi (2022), ada 5 (lima) program strategi pemberdayaan yang terdiri dari; pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat (swasta), pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi tepat guna.

Desa Kesongo Kabupaten Semarang telah melakukan langkah-langkah dalam menuju *Clean Government & Good Governance*, meliputi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, penguatan sistem pengawasan, digitalisasi layanan publik, peningkatan partisipasi publik, penerapan sistem reward and punishment, serta berprestasi dan memberi sanksi kepada yang melanggar. Manfaat *Clean Government & Good Governance*, meliputi, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan yang efektif dan efisien, mengurangi tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme, menciptakan kestabilan politik dan sosial, memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera bagi masyarakat. Perkembangan *Clean Government & Good Governance* Desa Riset Kesongo dalam rangka membangun tata pemerintahan yaitu dengan melaksanakan berbagai program kegiatan sudah dilakukan antara lain; administrasi desa secara digital, administrasi kependudukan bisa diakses melalui website, transparansi anggaran melalui media online, dll. Berikut beberapa potensi yang dimiliki Desa Kesongo, nampak pada Gambar 2,



Manfaat Desa Berbasis Riset di Kesongo Kabupaten Semarang ini antara lain; mengoptimalkan potensi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong inovasi pemerintah desa dan masyarakat desa berbasis penelitian. Rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam konteks pemberdayaan desa dan masyarakat pada Model Desa Berbasis Riset Kesongo sebagai miniatur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Peningkatan dan inovasi model penyelenggaraan pemerintahan harus dikembangkan paradigma, regulasi dan dukungan penerapan teknologi tepat guna dan tepat sasaran untuk menyelesaikan

permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik di desa;

- 2) Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan dukungan kepada Pemerintah Desa untuk mampu menjaga, meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakatnya, jejaring kerja sama dengan multi pihak (Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Dunia Industri, PTN/PTS) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan publik;
- 3) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menginisiasi pengembangan contoh-contoh model Desa Berbasis Riset dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Desa-Desa di Provinsi Jawa Tengah sesuai potensi dan permasalahan masing-masing.

## **Pembahasan**

Desa berpotensi untuk kesejahteraan masyarakat memiliki beragam kearifan lokal. Desa Kesongo memiliki potensi kearifan lokal diantaranya; kegiatan budaya dan mengangkat kearifan lokal, dokumen kesejarahan Desa Kesongo, museum mini, pengolahan pertanian terpadu, dan peternakan integratif. Perangkat desa di Kesongo telah melakukan proses pengorganisasian masyarakat yang bertujuan untuk yang berfungsi sebagai wadah untuk memberdayakan masyarakat, mendorong partisipasi mereka, dan menjadi mandiri untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan desa menurut Darwis et al (2022) bahwa, desa berdaya dan sejahtera melibatkan peran serta masyarakat dalam kelembagaan desa. Peran aktif masyarakat setempat menjadi pusat kesuksesan pembangunan desa dan pemerintahan desa memiliki komitmen dalam koordinasi dan pendampingan terhadap keterampilan dan pemodalannya serta terpenuhi infrastruktur memadai.

Pemerintah Desa Kesongo bersama masyarakat menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya lokal antara lain; sedekah bumi, pagelaran wayang kulit dalam rangka “Merti Desa Kesongo” dan kirab budaya serta menggali dan menghidupkan kembali tradisi budaya yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dalam rangka melestarikan budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat. Sejalan dijelaskan oleh Atmoko (2021) bahwa strategi pengembangan potensi desa wisata dengan perencanaan partisipatif dalam pengembangan pariwisata di desa wisata dengan menerapkan *Community Based Tourism* sebagai pendekatan pengembangan pariwisata. Pemberdayaan merupakan pembangunan berbasis masyarakat berarti sasaran pemberdayaan itu sendiri adalah masyarakat dan pelaku utama dalam kegiatan tersebut juga masyarakat. Tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya kemandirian. Untuk itu, pemerintahan desa perlu melakukan aksi langkah awal dalam mewujudkan program kegiatan pemberdayaan desa.

Langkah awal dalam pemberdayaan masyarakat adalah tahap persiapan, yang meliputi identifikasi masalah dan potensi, serta sosialisasi untuk menjalin komunikasi dan membangun kepercayaan dengan masyarakat dan pihak terkait. Menurut Permadi et al (2022) bahwa yang menjadi indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat mencakup partisipasi aktif masyarakat, peningkatan pendapatan dan taraf hidup, peningkatan kapasitas dan keterampilan, peningkatan akses ke layanan dasar (kesehatan dan pendidikan), serta peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Jadi indikator pemberdayaan masyarakat di Kesongo harus dapat diukur, relevan, dan mencerminkan perubahan yang diharapkan. Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek penting dalam mengembangkan desa wisata. Hal ini dikarenakan pengembangan desa wisata banyak menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat.

Lebih lanjut menurut Permadi et al (2022) telah melakukan pengembangan terhadap desa wisata untuk memberikan sejumlah keuntungan kepada masyarakat, seperti peningkatan ekonomi, pelestarian budaya

dan lingkungan, dan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia. Jadi upaya pengembangan pariwisata mencakup pengembangan infrastruktur dan amenitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), promosi digital, penerapan pariwisata berkelanjutan, serta kolaborasi multi-pihak antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi. Fokus utamanya adalah meningkatkan daya tarik destinasi dan kualitas layanan untuk memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan, serta mensejahterakan masyarakat lokal.

Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Desa Kesongo, maka cara pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata, dapat melalui beberapa alternatif cara antara lain; (1) mengembangkan potensi alam, budaya, dan keunikan desa menjadi destinasi wisata yang menarik, (2) memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam bidang manajemen keuangan, pelayanan wisata, pengelolaan sampah, dan keterampilan lainnya untuk meningkatkan kapasitas mereka, (3) melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata, (4) mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada seperti hasil pertanian, kerajinan, atau keahlian lokal untuk dijadikan produk dan jasa wisata, dan (5) membangun kolaborasi dengan pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pihak swasta untuk mendapatkan dukungan pendanaan dan infrastruktur yang memadai. Jadi peran serta masyarakat dalam pengambilan dan pembuatan keputusan dalam pengembangan pariwisata di wilayah mereka berpotensi memberdayakan masyarakat setempat agar terlibat dalam pengembangan pariwisata dengan sikap aktif dan bertanggung jawab, bukannya sikap pasif yang sering dikaitkan dengan proyek-proyek pembangunan di negara berkembang.

Permasalahan ekonomi, sosial, maupun budaya menjadi akar permasalahan pemberdayaan masyarakat. Selain itu permasalahan dalam desa adalah kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program-program dari pemerintah desa. Menurut Syaifudin & Ma'ruf (2022) bahwa, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa yang kurang berkompeten tentunya akan mempengaruhi kemajuan pembangunan yang ada di desa. Untuk menemukan jalan keluar terkait permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan perbaikan taraf hidup masyarakat yang lebih baik yang ada di desa. Pemberdayaan masyarakat menjadi satu pilihan pemerintah desa guna menghadapi permasalahan yang ada di desa. Jadi pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini adalah strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat yang lebih sejahtera.

Desa Kesongo merupakan Desa Riset merupakan model desa berbasis riset yang digagas peneliti Brida Jateng yang didukung komitmen kuat oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat Desa setempat, Pemerintah Kabupaten Semarang, BRIN, PTN/PTS, OPD Terkait Provinsi Jawa Tengah. Model desa riset Kesongo Kabupaten Semarang diharapkan dapat menjadi laboratorium riset dan inovasi model penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi Jawa Tengah. Pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang sangat penting agar nantinya masyarakat bisa mandiri tanpa perlu lagi diarahkan atau dituntun oleh pemerintah atau para agen perubahan. Disini pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlunya peran – peran pihak lain agar bisa mencapai target yang diharapkan.

Model Desa Berbasis Riset di Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang diimplementasikan sebagai salah satu upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 5 (lima) aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagai berikut:

- 1) Inisiasi penyusunan kesejarahan Desa dan potensi kearifan lokal Desa. Pemerintah Desa bersama masyarakat menggali kesejarahan desa dan mendokumentasikan dalam tulisan/museum desa. Dalam melestarikannya Pemerintah Desa dan masyarakat menyelenggarakan berbagai event budaya lokal dan

menghidupkan kembali tradisi budaya yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dalam rangka melestarikan budaya dan kearifan lokal (local wisdom) masyarakat setempat.

- 2) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang clean government dan good governance. Pemerintah Desa Kesongo melaksanakan inovasi berbagai program kegiatan pelayanan kepada masyarakat antara lain: 1) Administrasi Kependudukan bisa diakses melalui website, 2) Transparansi Pengelolaan Keuangan dan APBDesa melalui media online (website dan infografis desa), 3) Pelayanan masyarakat berbasis digital (layanan suratmenyurat elektronik, tanda tangan digital, dll), 4) Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat melayani kebutuhan masyarakat di Kantor sesuai jam kerja instansi pemerintah dan pelayanan 24 jam di rumah. Hal tersebut dipengaruhi oleh kepemimpinan Kepala Desanya (Azizah Qurrotu Ainii, 2021).
- 3) Mendorong pelaksanaan Sistem Pertanian Terpadu/Integrated Farming System (IFS). Pelaksanakan berbagai program kegiatan antara lain: Uji Coba Pengelolaan. Tanah dan Tanam Padi Umur Pendek dengan Teknologi Pertanian Modern, Uji coba Mina Padi Apung, pembuatan Pupuk Organik dalam Sistem Pertanian Terpadu (Integreted Farming System).
- 4) Memberikan dukungan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM). Pemerintah Desa Kesongo melaksanakan dan fasilitasi pengembangan ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah secara terpadu, dengan menerapkan prinsip Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dalam pengelolaan sampah dan menjadi pupuk organik yang dapat dimanfaatkan menjadi pupuk pertanian dan perkebunan.
- 5) Memberikan dukungan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Sirkular. Pemerintah Desa Kesongo melaksanakan dan fasilitasi pengembangan ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah secara terpadu, dengan menerapkan prinsip Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dalam pengelolaan sampah dan menjadi pupuk organik yang dapat dimanfaatkan menjadi pupuk pertanian dan perkebunan.

Pendampingan intensif BRIDA) Provinsi Jawa Tengah dan Badan Riset dan BRIN tahun 2024 menunjukkan relevansi Model Desa Riset Kesongo secara faktual merupakan miniatur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Faktanya semua aktivitas penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia berada di desa dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa. Keberhasilannya tidak terlepas dari pengabdian perangkat desa setempat.

## **Kesimpulan**

Pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dengan beberapa unsur terpenuhi, anatara lain; (1) semua urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pelayanan publik dapat berjalan dengan subyek dan obyek warga masyarakat di Desa setempat, (2) optimalisasi organisasi pemerintahan desa seperti; lembaga perwakilan desa yang disebut Badan Permusyaratan Desa (BPD) dan lembaga desa (LKMD), dan lembaga kepemudaan (Karang Taruna), dan lainnya, (3) efektivitas dan tepat sasaran program desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyaratan Desa (BPD), (4) keteladanan dan komitmen Kepala Desa beserta perangkat dalam program pemberdayaan desa, dan 5). Kepala Desa bersama perangkat melibatkan peran aktif masyarakat dan mampu menjalin akses dan kerjasama stakeholder dalam pemberdayaan desa secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan desa riset di Kesongo Kabupaten Semarang telah memberikan manfaat, antara lain; (1) inisiasi penyusunan kesejarahan desa dan potensi kearifan lokal desa, (2) mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa *Clean Government & Good Governance*, (3) mendorong pengembangan sistem pertanian terpadu (*Integreted Farming System*), (4) memberikan dukungan dan fasilitasi pengembangan ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah, dan (5) memberikan dukungan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini masih terbatas dalam satu desa dan perlu dilakukan penelitian dalam skala besar untuk beberapa desa percontohan di Jawa Tengah dan Indonesia.

### Ucapan Terima Kasih

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Riset Dan Inovasi Provinsi Jateng yang telah memberikan dukungan kegiatan penelitian di Kesongo. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Brin yang telah turut serta memberikan arahan untuk terlaksananya penelitian ini. Dan segenap teman-teman Brida Jateng yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung suksesnya kegiatan pendampingan Desa Kesongo Jateng. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada Kepala Desa beserta perangkat dan komunitas UMKM serta masyarakat Desa Kesongo atas segala dukungannya. Terima kasih kami sampaikan kepada pengelola Jurnal Edu Cendikia yang telah menerbitkan hasil penelitian kami.

### Referensi

- Atmoko, T. P. H. (2021). Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman. *Media Wisata*. <https://doi.org/10.36276/mws.v12i2.209>
- Budhi Pamungkas Gautama, Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.414>
- Cecilia Fahima Faradiba, Bima Wahyu Adiputra, Haris Vikriansyah, Liliana Floren Valensia, & Tiara Nur Angraini. (2023). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Sosial, Pendidikan, Serta Keagamaan di Desa Bagorkulon Kabupaten Nganjuk. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v4i1.627>
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. In *Mycological Research*.
- Darwis, R. S., Miranti, Y. S., Saffana, S. R., & Yuandina, S. (2022). Kewirausahaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*. <https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.37495>
- Hardianto, H. (2022). Determinasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberantasan Kemiskinan Desa: Analisis Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (Literature Review Manajemen Keuangan). *Jurnal manajemen pendidikan dan ilmu sosial*. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.872>
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3119>
- Komariah, N., Saepudin, E., & Yusup, P. M. (2018). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pariwisata Pesona*. <https://doi.org/10.26905/jpp.v3i2.2340>
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Jurnal Publiciana*.
- Mohamad Nur Singgih. (2021). Development Competitiveness Model Of Village Owned Enterprises (

BUMDES) Through The Global Competition. *International Journal of Science, Technology & Management*. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i4.248>

Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). Sosialisasi Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pariwisata Di Dinas Pariwisata Kota Medan. *Jurnal PKM Hablum Minannas*. <https://doi.org/10.47652/jhm.v1i11.113>

Permadi, N. A., Yulianti, R., Berthanilla, R., Marthalena, & Sukendar. (2022). Strategi Pengembangan Desa Wisata. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i2.5761>

Saepudin, E. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata. *Dharmakarya*. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v1i11.27569>

Setyariningsih, E., & Utami, B. (2022). Pemberdayaan UMKM Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Segunung Kecamatan Dlanggu Mojokerto. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*. <https://doi.org/10.55542/jppmi.v1i4.258>

Suharto, S. (2021). Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Implementasi Undang-Undang Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*. <https://doi.org/10.31629/juan.v9i1.3223>

Sunarti, S., Damayanti, M., Esariti, L., Rahdriawan, M., & Medina, N. C. (2022). Tantangan Pengembangan Wisata Berdasarkan Dinamika Partisipasi Masyarakat Desa Montongsari, Kabupaten Kendal. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*. <https://doi.org/10.14710/pwk.v18i4.49740>

Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p365-380>